

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah salah satu sektor dari pembangunan di Indonesia yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah karena peran pariwisata yang sangat penting sebagai penghasil devisa negara (Sunaryo, 2013). Kegiatan pariwisata mampu menumbuhkan sektor-sektor lain sehingga mempermudah dalam menambahkan pemasukan daerah (Pendit, 2006). Pembangunan sektor pariwisata menjadi salah satu isu strategis dalam pengembangan kepariwisataan Kota Batu sebagai salah satu bagian dari wilayah Malang Raya yang secara umum kebijakan pengembangan pariwisata Malang Raya merupakan bagian dari kebijakan pengembangan pariwisata Jawa Timur. Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional diisyratkan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam pembangunan daerah termasuk pembangunan dan pengembangan pariwisata yang secara hirarkis harus berada dalam kerangka perencanaan skala provinsi dan nasional.

Proses pembangunan dan pengembangan pariwisata membutuhkan peran aktif dari setiap stakeholder. Secara umum stakeholder tersebut dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah (Pinata et al, 2005). Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok masyarakat maupun perorangan yang mendukung pengelolaan suatu wisata. Selanjutnya kelompok swasta meliputi kelompok usaha wisata dan para pengusaha serta instansi pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Para stakeholder yang terlibat dalam suatu pengelolaan wisata mempunyai peran masing-masing. Peran tersebut akan mempengaruhi hubungan kerjasama yang terjalin serta mampu menyebabkan pertentangan dalam pengelolaan suatu wisata, baik dalam bentuk penentuan kebijakan, kesamaan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi maupun aturan kelembagaan lainnya. Hubungan kerjasama antar stakeholder dalam suatu pengelolaan wisata sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan (Laksono, 2012).

Menurut UN-WTO tahun 2002, stakeholder memiliki fungsi dalam menentukan kebijakan pariwisata. Terdapat lima fungsi pokok stakeholder yang sangat strategis dan bertanggung jawab. Fungsi yang pertama adalah membangun kerangka (framework) operasional yang melibatkan sektor publik dan swasta dalam menggerakkan kegiatan pariwisata. Fungsi yang kedua, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi dan control yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya. Fungsi yang ketiga, menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan prasarana komunikasi. Fungsi yang keempat yaitu membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang professional. Fungsi yang terakhir adalah menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun kedalam rencana kongkret. Namun, banyaknya peran yang dimiliki oleh *stakeholder* dalam tahap pengaplikasiannya sering menimbulkan pertentangan sehingga menyebabkan terjadinya konflik pengelolaan (Abdul, 2013).

Keterlibatan banyak *stakeholder* dengan fungsi yang berbeda-beda dalam pengelolaan suatu wilayah terjadi pada pengelolaan di Wisata Kuliner Payung. Wisata Kuliner Payung merupakan salah satu obyek wisata yang terdapat di Kota Batu dan terletak diperbatasan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Daya tarik yang ditawarkan yaitu sebuah lokasi kuliner dengan didukung panorama alam yang dapat dinikmati dari atas Kota Batu. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, Wisata Kuliner Payung merupakan salah satu icon wisata Kota Batu. Jalan menuju obyek wisata dari arah batu cukup menanjak dan berliku yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Wisata Kuliner Payung dibagi menjadi tiga segmen yang terdiri dari Payung 1, Payung 2, dan Payung 3, setiap segmen terdapat bangunan warung-warung makanan dan minuman. Bentuk bangunan warung terbuat dari bambu dan berbentuk seperti rumah panggung.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu menyebutkan bahwa pengelolaan Wisata Kuliner Payung terhambat oleh adanya suatu konflik. Konflik bermula disebabkan oleh tidak adanya peraturan atau kebijakan yang terkait dengan lokasi wisata tersebut, sehingga menyebabkan tidak ada penentuan batas lokasi yang boleh dan tidak boleh digunakan sebagai lokasi berwisata atau berjualan. Konflik semakin diperkuat dengan adanya rencana penambahan lokasi pembangunan warung oleh Paguyuban Pedagang Wisata Kuliner Payung. Rencana penambahan lokasi pembangunan warung memiliki beberapa alasan, alasan yang utama bagi para pedagang adalah penghasilan yang bisa diperoleh dari kegiatan wisata tersebut, mereka memperoleh

keuntungan langsung berupa materi yaitu penghasilan tambahan karena sebelumnya hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan sebagai petani dan peternak.

Perum Perhutani KPH Malang juga tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerah hutan yang menjadi bagian dari perencanaan mereka. Pihak perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kehutanan juga mendukung kegiatan Wisata Kuliner Payung karena untuk membangun warung di lokasi Wisata Kuliner Payung para pedagang memberikan biaya sewa sehingga menjadi salah satu pendapatan bagi pihak Perhutani. Arahan pengelolaan dari Paguyuban Pedagang Wisata Kuliner Payung dan Perum Perhutani KPH Malang bertolak belakang dengan adanya usulan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu untuk melakukan pengeprasan tebing dengan tujuan menghindari bahaya tanah longsor yang masih mengancam. Selain itu, menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah dikuatkan melalui Perda No. 7 Tahun 2011 menunjukkan bahwa kawasan arah tenggara Wisata Kuliner Payung adalah daerah pertanian dan kawasan hutan penyangga.

Konflik tersebut menunjukkan bahwa kegiatan wisata yang ada di Wisata Kuliner Payung melibatkan banyak stakeholder dalam proses pengelolaannya dengan fungsi yang berbeda-beda. Perbedaan fungsi dari masing-masing stakeholder semakin menghambat proses penentuan pengelolaan Wisata Kuliner Payung dengan solusi yang tepat dan memuaskan semua pihak. Kegiatan Wisata Kuliner Payung jika tidak dikelola dan diatur dengan baik akan memberikan dampak buruk, karena banyak pedagang yang menggantungkan penghasilan dari wisata tersebut serta terdapat permukiman yang berada di bawah lokasi Payung yang berpotensi terkena dampak buruk jika terjadi tanah longsor di lokasi Wisata Kuliner Payung. Proses penyelesaian konflik pengelolaan di Wisata Kuliner Payung sebenarnya sudah diupayakan beberapa alternatif pemecahan masalah, namun banyaknya jumlah stakeholder lain yang ikut terlibat menyebabkan munculnya perbedaan cara pandang antar pihak pengelola kawasan dengan pedagang (Zulfikar, 2013).

Berdasarkan kondisi banyaknya jumlah *stakeholder* yang ikut terlibat pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung memunculkan konflik baru yang perlu diketahui lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alternatif pengelolaan yang paling diprioritaskan dalam mengelola Wisata Kuliner Payung berdasarkan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Sehingga, hasil penelitian ini adalah teridentifikasi konflik-konflik yang mempengaruhi pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan

alternatif pengelolaan. Selain itu, teridentifikasi juga *stakeholder key player* yang digunakan sebagai responden untuk menentukan alternatif pengelolaan yang paling prioritas dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi pariwisata di Wisata Kuliner Payung terdapat tiga identifikasi masalah yang menjadi dasar penelitian. Berikut merupakan identifikasi permasalahan wisata kuliner Payung yang terdapat di Kota Batu.

1. Keberadaan lokasi wisata payung di daerah tebing memiliki tingkat bahaya untuk dikembangkan, hal ini juga didukung di area lokasi tersebut sudah dua kali mengalami tanah longsor pada tahun 2013 yang berdampak pada tertutupnya setengah badan jalan yang menghubungkan Kota Batu dengan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Pengembangan sektor wisata kuliner yang baik harus mempertimbangkan lokasi yang akan dijadikan pengembangan wisata serta dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat yang akan ditimbulkan oleh kegiatan wisata tersebut (Oka. A. Yoeti, 2001). Menurut Damanik dan Weber (2006) Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada lingkungan alam dan cagar budaya untuk mempertahankan daya tarik obyek wisata termasuk peraturan pemanfaatan sumberdaya lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan.
2. Kurangnya koordinasi dari setiap stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata kuliner payung karena masih terdapat perbedaan tujuan dalam pengelolaan wisata kuliner Payung. Paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung merencanakan adanya penambahan lokasi Wisata Kuliner Payung untuk meningkatkan kegiatan wisata karena jumlah pengunjung yang semakin berkurang. Namun, Pemerintah Daerah Kota Batu melarang adanya rencana tersebut karena adanya potensi bahaya tanah longsor di lokasi tersebut serta berdasarkan peta RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030 lokasi wisata payung adalah kawasan lindung yang dilarang adanya pembangunan. Seharusnya dalam pengelolaan sektor wisata yang baik harus ada visi yang sama dari setiap stakeholder yang terlibat selain itu untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari pengusaha selaku pelaku bisnis. Pemerintah harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata akan

memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. (Liu, 2000)

3. Penentuan kebijakan Wisata Kuliner Payung di bawah dua instansi yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu dan Perum Perhutani KPH Malang. Namun kondisi yang ada saat ini tidak ada kebijakan yang digunakan sebagai acuan pengelolaan Wisata Kuliner Payung sehingga berdampak terhadap terhambatnya pengembangan Wisata Kuliner Payung (Hasil Survei, 2016). Sebuah lokasi wisata jika penentuan kebijakannya dibawah tanggung jawab dua *stakeholder* atau lebih akan menyebabkan konflik pengelolaan jika dalam penentuannya tidak memiliki visi yang sama (Wirawan, 2004).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dari Wisata Kuliner Payung Kota Batu adalah sebagai berikut.

1. Apa saja konflik yang terjadi pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung Kota Batu?
2. Bagaimana posisi masing-masing *stakeholder* terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung?
3. Bagaimana alternatif pengelolaan yang sesuai dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung Kota Batu berdasarkan *stakeholder*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka diperoleh dua tujuan penelitian di Wisata Kuliner Payung Kota Batu adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi konflik-konflik yang terjadi serta alternatif pengelolaan dari masing-masing *stakeholder* pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung.
2. Mengidentifikasi dan memetakan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Wisata kuliner Payung.
3. Menentukan sub kriteria yang digunakan pada penilaian alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung.
4. Menentukan prioritas alternatif pengelolaan yang sesuai dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung Kota Batu.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui alternatif pengelolaan yang diambil stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan Wisata Kuliner Payung, maka diharapkan hasil penelitian dapat mendatangkan manfaat bagi:

1. Pemerintah

Sebagai masukan dan kontribusi bagi pemerintah Kota Batu dalam mengetahui kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder yang terlibat di dalam pengelolaan serta masukan bagi pemerintah Kota Batu dalam menentukan alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung Kota Batu.

2. Masyarakat

Sebagai media untuk menimbulkan rasa kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah, sehingga mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

3. Mahasiswa

Sebagai bahan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengetahui kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder dalam pengelolaan suatu wilayah serta mengetahui cara menentukan alternatif kebijakan pada penyelesaian konflik stakeholder pada wilayah lain.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Secara umum wilayah Kota Batu adalah daerah perbukitan dan pegunungan, sedangkan kemiringan lahan (*slope*) di Kota Batu berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtanal 2001 diketahui bahwa sebagian besar wilayah perencanaan Kota Batu mempunyai kemiringan lahan 25 – 40% dan kemiringan 40%. Pada lokasi wisata payung termasuk dalam kemiringan > 40%. Kota Batu merupakan daerah pegunungan yang memiliki hawa dingin dengan suhu udara 21,3°C dan 34,2°C sehingga sangat cocok untuk kegiatan wisata alam. Kota Batu memiliki wilayah yang subur untuk kegiatan pertanian karena memiliki jenis tanah yaitu tanah endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu.

Wilayah yang menjadi lokasi penelitian atau lokasi studi di fokuskan pada satu lokasi Wisata Kuliner Payung yang terletak di Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Penentuan batas lokasi penelitian ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan Paguyuban Wisata Kuliner Payung dan Perum Perhutani KPH Malang yaitu disesuaikan

dengan batas fungsional dari Wisata Kuliner Payung. Berikut batas fungsional Wisata Kuliner Payung.

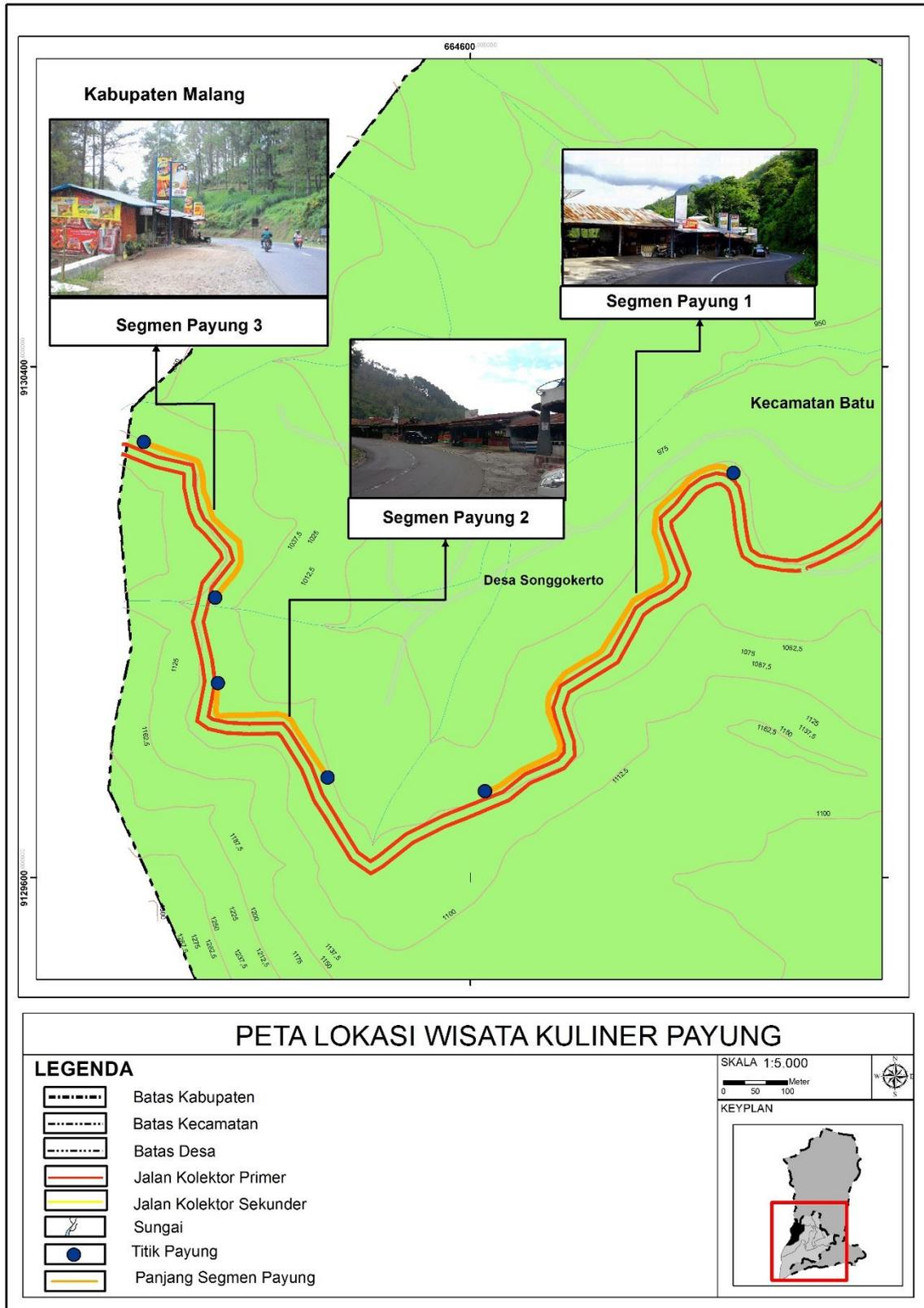
Batas barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Batas timur : Permukiman Kelurahan Songgokerto

Batas utara : Tebing jurang kawasan hutan

Batas Selatan : Jalan Batu-Pujon

Batas lokasi penelitian berdasarkan batas fungsional Wisata Kuliner Payung dapat dilihat pada *Gambar 1.1*.



Gambar 1.1 Peta Kelurahan Songkokerto

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada penelitian dibatasi berdasarkan konflik yang terjadi di Wisata Kuliner Payung Kota Batu dan alternatif penyelesaian konflik dari *stakeholder* yang terlibat yang terdiri dari pemerintah, akademisi dan lembaga swasta yang memiliki pengetahuan dan kontribusi dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Penelitian pemilihan alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung memiliki ruang lingkup materi sebagai berikut:

1. Identifikasi konflik pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Potensi konflik yang dibahas pada penelitian ini adalah konflik pengelolaan yang dianalisis berdasarkan perbedaan tujuan, perbedaan fungsi dan perbedaan alternatif pengelolaan dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Kemudian alternatif dari setiap *stakeholder* akan diurutkan berdasarkan prioritasnya melalui analisis *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) menggunakan metode TOPSIS.

2. Identifikasi posisi dari setiap *stakeholder* yang terlibat.

Penentuan posisi *stakeholder* pada penelitian ini ditentukan berdasarkan variabel tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh. Pada penelitian ini hasil dari perhitungan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh *stakeholder* akan menentukan kuadran dari masing-masing *stakeholder*. Posisi *stakeholder* dibagi menjadi empat yaitu kuadran pemain (*player*), subjek (*subject*), penonton (*spectator*), aktor (*actor*).

3. Penentuan sub kriteria yang digunakan pada analisis *Multi Criteria Decision Making* (MCDM).

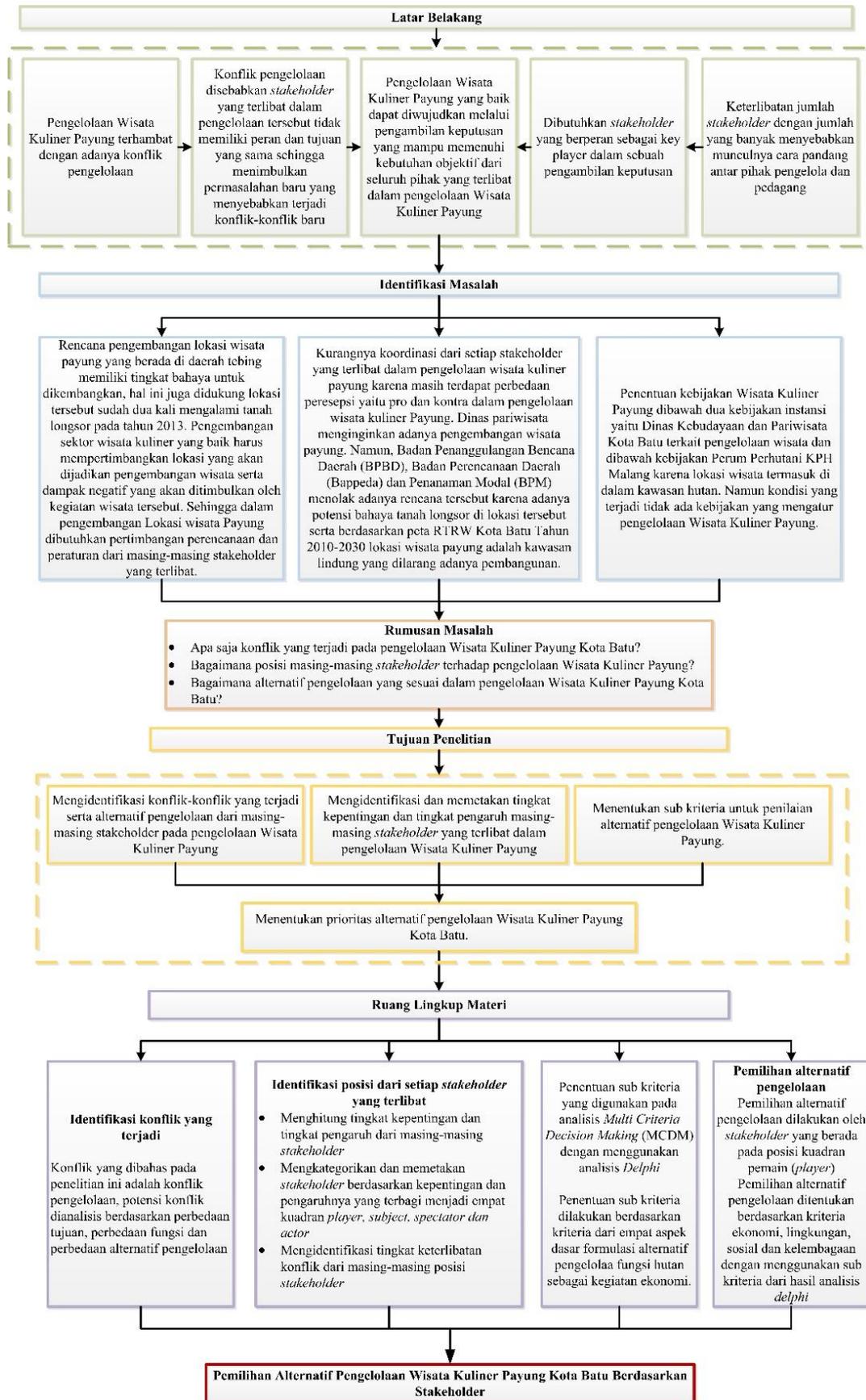
Penentuan sub kriteria dilakukan berdasarkan kriteria dari teori empat aspek dasar formulasi alternatif pengelolaan fungsi hutan sebagai kegiatan ekonomi. Wisata Kuliner Payung adalah suatu wisata yang permasalahannya tidak hanya terkait dengan permasalahan pariwisata namun terdapat juga permasalahan yang terkait dengan ekonomi, lingkungan, sosial dan kelembagaan. Selain itu, lokasi yang digunakan sebagai lokasi wisata payung adalah lokasi yang mengubah fungsi hutan menjadi kegiatan ekonomi. Sehingga kriteria ekonomi, lingkungan, sosial dan kelembagaan sesuai untuk dijadikan kriteria pada pemilihan alternatif pengelolaan Wisata kuliner Payung.

4. Menentukan prioritas alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung Kota Batu menggunakan analisis *Multi Criteria Decision Making* (MCDM).

Pada penelitian ini penentuan alternatif pengelolaan dilakukan oleh *stakeholder* yang berada posisi kuadran pemain (*player*). Pemilihan alternatif pengelolaan ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi, lingkungan sosial dan kelembagaan dengan menggunakan sub kriteria dari hasil analisis delphi. Kemudian alternatif yang akan dinilai prioritasnya adalah alternatif dari hasil analisis konflik.

Berdasarkan ruang lingkup materi yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga hasil yang dapat dirumuskan adalah pemilihan alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

1.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian ini menjelaskan tentang urutan dan isi dari setiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi serta kerangka pemikiran dari penyusunan laporan penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang beberapa tinjauan teori serta konsep yang mendukung pembahasan terhadap penelitian. Literatur yang ada dapat menjadi acuan dalam analisis data dan penelitian sejenis yang menjadi penunjang penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian yang dimulai dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data yang digunakan, diagram alir penelitian dan desain survei yang berfungsi sebagai pedoman penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang data yang diperoleh dari survei primer serta survei sekunder, analisis data dan strategi atau keputusan yang dihasilkan dari analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan temuan baru dari hasil analisis. Selain itu, peneliti juga akan memberikan saran sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian “Pemilihan Alternatif Pengelolaan Wisata Kuliner Payung Kota Batu Berdasarkan *Stakeholder*”.